



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo
Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam Penyelesaian
Sengketa Laut China Selatan
(2009-2016)**

Skripsi

Oleh

Tiara Hanandita

2013330105

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo
Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam Penyelesaian
Sengketa Laut China Selatan
(2009-2016)**

Skripsi

Oleh

Tiara Hanandita

2013330105

Pembimbing

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

Bandung

2017



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



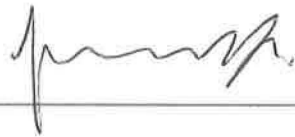
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Tiara Hanandita
Nomor Pokok : 2013330105
Judul : Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa
Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam Penyelesaian Sengketa Laut
China Selatan (2009-2016)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 21 Desember 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., MA.


: 

Anggota

Albert Triwibowo, S.IP., MA.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (2009-2016)”**. Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis kerjakan untuk memperoleh gelar akademik strata-1 dan juga sebagai tolak ukur bagi pengajar akan kemampuan penulis sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun karenanya, penulis mengharapkan berbagai jenis masukan baik saran maupun kritik dari para pembaca dimana dengan demikian penulis dapat menyempurnakan tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian yang akan datang.

Bandung, 15 Desember 2017



Penulis

Tiara Hanandita

Abstrak

Nama : Tiara Hanandita
NPM : 2013330105
Judul : Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (2009-2016)

Sengketa laut China Selatan bukan merupakan konflik yang baru saja muncul di dunia internasional. Konflik ini dimulai semenjak abad ke-19 dimana enam negara yaitu China, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan Taiwan mengeluarkan klaim bahwa pulau Spratly dan Paracel termasuk dalam wilayahnya. Pulau Spratly dan Paracel terletak di area dekat kawasan Asia Tenggara dimana Indonesia berada. Indonesia, berlandaskan kepentingan nasionalnya sendiri, membantu untuk menyelesaikan sengketa laut China Selatan ini. Penelitian yang berjudul “Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (2009-2016)” ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Apa perbedaan usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada masa kepresidenanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam penyelesaian sengketa laut China Selatan?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana perbedaan yang terjadi terhadap penanganan aksi-aksi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan pada periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Peneliti menemukan bahwa kedua Presiden memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan kepentingan nasional yang harus dipenuhi lewat kebijakan luar negerinya. Susilo Bambang Yudhoyono lebih mementingkan untuk menaikkan derajat Indonesia di dunia internasional dan salah satunya adalah dengan berdiplomasi. Joko Widodo memprioritaskan penguatan domestik melalui diplomasi. Dengan kedua pandangan ini, intensitas diplomasi Indonesia untuk membantu penyelesaian sengketa Laut China Selatan pun berbeda.

Kata kunci : Laut China Selatan, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Indonesia, Diplomasi, Politik Luar Negeri.

Abstract

Name : Tiara Hanandita
NPM : 2013330105
Title : *"Differentiation of Diplomatic Efforts Between Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo in Helping the Resolution of South China Sea Dispute "*

South China Sea Dispute is not a new conflict that popped up in the international sphere. This conflict began in the 19th century where six countries, which were China, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Philippine, and Taiwan, were putting out claims that Paracel and Spratly Islands was within their territory. Spratly and Paracel Islands are located near Southeast Asia, the region where Indonesia resides. Indonesia, with its own national interest, helped the resolution of this South China Sea dispute. The research, with the title of "Differentiation of Diplomatic Efforts Between Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo in Helping the Resolution of South China Sea Dispute " seeks to answer the research question "What are the difference in the diplomacy efforts that Indonesia has done at the time of Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo presidency period in regards to helping the Resolution of South China Sea Dispute?". The aim of this research is to differentiate the diplomatic efforts that are being done to help the resolution of South China Sea dispute by Indonesia while Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo reign as Indonesia's President. The author found that the two Presidents have two different outlook on what the main priorities are for the country's national interest that will be fulfilled by its foreign policy. Susilo Bambang Yudhoyono prioritize in enhancing Indonesia's value in the international world and one of the effort is by diplomacy. While, Joko Widodo priorities are more on enhancing the domestic power through diplomacy. With these two different outlooks, the intensity of diplomatic efforts to help the resolution of South China Sea dispute will also be different.

Keywords : South China Sea Dispute, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Indonesia, Foreign Policy, Diplomacy

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (2009-2016)”**. Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis kerjakan untuk memperoleh gelar akademik strata-1 dan juga sebagai tolak ukur bagi pengajar akan kemampuan penulis sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun karenanya, penulis mengharapkan berbagai jenis masukan baik saran maupun kritik dari para pembaca dimana dengan demikian penulis dapat menyempurnakan tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian yang akan datang.

Bandung, 15 Desember 2017

Penulis

Tiara Hanandita

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada **Allah SWT** yang telah memberikan saya kesempatan dan ketabahan untuk kuliah di FISIP UNPAR jurusan HI selama empat tahun setengah dan bisa juga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih juga kepada **ayah dan bunda** saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya. Tanpa dukungan dari orang tua saya mungkin tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Nasihat-nasihat yang diberikan mereka juga sangat membantu saya dalam kehidupan kampus maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga karena sudah bersedia membayar uang lebih karena harus *extend* selama satu semester dan tidak memarahi saya besar-besaran. Sebenarnya masih banyak sekali yang saya harus ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda tapi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih juga **Uti** yang selalu mendoakan kesehatan dan kelancaran hidup aku dimanapun Uti berada. Masakan-masakan Uti juga sangat membantu aku agar tidak penat dan putus asa. Dengan ngobrol dengan Uti juga aku bisa melepaskan stress karena skripsi ini hahahaha.

Terima kasih untuk dosen pembimbing saya **Mas Apres** yang sudah sabar dengan saya. Meskipun saya banyak sekali kekurangan dan bimbingannya tidak rutin mas Apres tidak pernah menyerah untuk membimbing saya dan membantu saya semaksimal mungkin. Masukan-masukan yang diberikan sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mas Apres setelah ini semakin sukses di segala aspek dalam kehidupannya. Semoga mas Apres diberi berkah, rezekinya naik, umurnya panjang, dan sehat selalu.

Terima kasih untuk teman-teman aku, **Nisa, Erika, Monika, Amira, Yaya, Caro, Bintang, Maria, Gisele, Billy, Hana, Hendri**. Ada dari kita yang sudah lulus dan ada juga yang belum tapi semua masih meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan menyemangati satu sama lain. Baik itu soal mengerjakan skripsi, hidup, ataupun kerjaan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang sukses di masa depan dan bisa berguna bagi negara! Semangat untuk kita semua!

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Identifikasi masalah	7
1.2.1 Perumusan Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan	9
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Teknik Pengumpulan Data	19
1.8 Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
Sengketa Laut China Selatan dan Posisi Indonesia	22
2.1. Gambaran Umum Sengketa Laut China Selatan	22

2.2. Negara-Negara yang Terlibat dalam Sengketa Laut China Selatan.....	24
2.2.1. China.....	24
2.2.2. Vietnam.....	24
2.2.3. Malaysia.....	26
2.2.4. Brunei Darussalam.....	26
2.2.5. Filipina	27
2.2.6. Taiwan.....	27
2.2.7. Indonesia.....	29
 BAB III	 30
 Laut China Selatan dan Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Periode 2009-2016	 30
 3.1. Diplomasi Indonesia Untuk Laut China Selatan Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2014)	 30
3.1.1. Diplomasi Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Secara Umum.....	30
3.1.2. Diplomasi Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terkait Isu Laut China Selatan	35
3.2. Diplomasi Masa Presiden Joko Widodo (2014-2019).....	39
3.2.1. Diplomasi Masa Presiden Joko Widodo Secara Luas.....	39
3.2.2. Diplomasi Masa Presiden Jokowi Mengenai Laut China Selatan.....	44
3.3. Perbedaan Gaya Diplomasi Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo	47
3.4. Diplomasi Indonesia Terhadap China terkait Sengketa Laut China Selatan Periode 2009-2016	57
3.4.1. Analisa Diplomasi yang Pemerintah Indonesia Lakukan	57

3.4.2. Analisa Usaha-usaha Diplomasi yang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Lakukan.....	66
BAB IV	81
SIMPULAN	81
Daftar Pustaka	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kelebihan dan Kekurangan Gaya Diplomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.....	55
--	----

DAFTAR SINGKATAN

APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ARF	: <i>Asian Regional Forum</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asia Nation</i>
BMI	: Buruh Migran Indonesia
CNOOC	: <i>China National Offshore Oil Cooperation</i>
CoHA	: <i>Cessation of Hostilities Agreement</i>
CSCAP	: <i>Council for Security Cooperation in the Asia Pacific</i>
DOC	: <i>Declaration of Agreement</i>
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GESF	: <i>General Expenditure Support Fund</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
PDB	: Produk Domestik Bruto
PRC	: <i>People's Republik of China</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

Sengketa laut China Selatan merupakan salah satu fenomena konflik yang mengangkat tentang isu perbatasan negara. Negara-negara yang berkonflik dalam sengketa ini adalah China, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Vietnam. Area laut China Selatan sendiri diperebutkan karena merupakan salah satu perairan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga pulau-pulau yg strategis. Selain itu laut China Selatan merupakan salah satu zona ekonomi yang sangat menguntungkan. Banyak kapal dagang dari berbagai negara yang melewati perairan tersebut.

Meskipun konfliknya terjadi diantara enam negara tetapi kejadian tersebut menarik perhatian negara yang berada di luar konflik. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sendiri tidak mengeluarkan klaim tentang kepemilikannya terhadap area laut China Selatan tetapi Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam adalah sesama anggota ASEAN. Terlebih lagi Vietnam secara eksplisit meminta bantuan Indonesia untuk menangani masalah laut China Selatan yang sedang ia hadapi tersebut.¹ Maka dari itu, Indonesia, sebagai pihak ketiga, dapat membantu negara-negara anggota ASEAN yang sedang berkonflik dengan China untuk menyelesaikan perseteruan tersebut. Maka dari itu penelitian ini

¹ Asril Sabrina, "Vietnam Minta Dukungan Indonesia Soal Laut China Selatan", *Kompas.com*, diakses 25 Mei 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/22051091/vietnam.minta.dukungan.indonesia.soal.laut.china.selatan>.<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/22051091/vietnam.minta.dukungan.indonesia.soal.laut.china.selatan>.

akan membahas tentang usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian sengketa laut China Selatan. Pada bab ini, penulis akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dunia internasional jaman sekarang, semua negara menjadi lebih terhubung dengan satu sama lain, baik dalam hubungan ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu juga, aktor yang melakukan hubungan antar negara juga menjadi lebih beragam. Tidak hanya menteri-menteri dan presiden dalam pemerintah tetapi para pebisnis, investor, pekerja, kelompok-kelompok berkepentingan, dan juga masyarakat awam juga bisa melakukan hubungan dengan pihak di negara lain. Yang menerima komunikasi untuk melakukan hubungan tersebut pula tidak harus dengan seseorang dengan status yang sama menjadikan hubungan yang dapat dilakukan dari satu negara ke negara lain menjadi lebih dinamis.²

Dengan hubungan yang semakin dinamis, isu-isu yang dihadapi oleh negara juga semakin kompleks. Banyak isu-isu yang sebelumnya tidak dibahas dalam pertemuan antara negara-negara yang naik kepermukaan dan menjadi bahan diskusi. Isu-isu baru yang muncul dari perkembangan ini adalah isu tentang alam, kelompok-kelompok terorisme, imigran, dan isu-isu non-militer lainnya.³ Dengan munculnya variasi isu dan juga perbanyakkan aktor yang dapat melakukan

² "Globalization", International Relations.org, diakses 19 Oktober 2016, <http://internationalrelations.org/globalization/>.

³ Ibid.

hubungan antar negara bukan berarti peran negara diabaikan. Negara masih memiliki status paling tinggi dalam menjalin hubungan di dunia internasional. Salah satu bukti dari pernyataan tersebut adalah hanya negara lah yang bisa menjadi anggota dari organisasi internasional. Agar suatu negara diakui sebagai negara yang sah, ada komponen *de facto* dan *de jure* yang harus dipenuhi oleh bangsa tersebut. Faktor *de facto* mencakup pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Artinya adalah sebuah negara harus wilayah yang cantumkan sebagai area negaranya, sekelompok individu atau rakyat yang menduduki wilayah tersebut, dan memiliki pemeritahan yang sah yang bisa mengatur rakyatnya. Pengakuan jenis ini lebih berkaitan dengan kedaulatan negara dalam dunia internasional. Faktor *de jure* menekankan pada pengakuan yang negara tersebut dapatkan dari negara-negara lain. Dengan adanya pengakuan *de jure* negara yang bersangkutan bisa menjadi leluasa dalam menjalin hubungan dengan negara lain, membuat perjanjian, dan juga menjalin kerja sama. Selain memudahkan manuver dalam hubungan internasional, pengakuan *de jure* juga mengakibatkan suatu negara harus mengikuti hukum-hukum internasional yang ada.⁴

Seperti yang sudah dituliskan di atas bahwa suatu negara dapat berhubungan dengan negara lain, bahkan dapat dikatakan bahwa pada abad ke-21 ini suatu negara tidak bisa tidak berubungan dengan negara lain dikarenakan tingkat interdependensi yang tinggi antar negara. Salah satu cara yang paling sering digunakan untuk menjalin hubungan antar negara adalah dengan melalui jalur diplomasi. Dalam kamus Oxford, diplomasi dapat diartikan sebagai sebuah

⁴ "Pengakuan De Facto Dan De Jure", Evo-Rare.Com, diakses pada 19 Oktober 2016, <http://www.evo-rare.com/2014/07/pengakuan-de-facto-dan-de-jure.html>.

profesi, aktivitas, atau keterampilan mengelola hubungan internasional, biasanya dengan perwakilan suatu negara di sebuah negeri⁵. Defnisi lain dikatakan oleh Hans J. Morgenthau. Menurutnya, diplomasi adalah promosi kepentingan nasional dengan cara yang damai. Diplomasi memiliki banyak bentuk yaitu diplomasi publik, diplomasi budaya, diplomasi jalur satu, diplomasi jalur dua, dll. Diplomasi merupakan salah satu cara yang paling populer, pada masa sekarang, untuk mempererat hubungan, memulai hubungan, dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi antar negara.⁶

China merupakan salah satu negara di lingkungan internasional yang mempunyai pengaruh besar, khususnya dalam bidang ekonomi internasional. China memulai jejaknya sebagai salah satu pemimpin di bidang ekonomi pada tahun 1982 ketika Deng Xiaoping, yang saat itu merupakan kepala partai komunis di China, melakukan reformasi ekonomi di China dengan target penggandaan GDP pada akhir abad ke-20. Pada tahun 1986, Presiden Deng memutuskan bahwa China akan menerapkan “open door policy” yang menyatakan bahwa China terbuka bagi investor yang mau menanamkan modalnya di negara tersebut Pada tahun 1988, diadakan perubahan konstitusi agar pengembangan usaha atau bisnis swasta dapat dikembangkan. Selain itu di tahun ini juga, China mulai melegalkan penjualan tanah. Dari sini lah muncul area-area seperti *Pudong Business District*

⁵ Diplomacy, diakses pada 4 September 2016,
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/diplomacy>

⁶ Dinesh, “Diplomacy: Meaning, Nature, Functions And Role In Crisis Management,”
Yourarticlelibrary.Com: The Next Generation Library, diakses pada tanggal 4 September 2016,
<http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/diplomacy-meaning-nature-functions-and-role-in-crisis-management/48491/>

yang menjadi salah satu pilar penyokong ekonomi China. Dapat dilihat disini bahwa strategi Deng Xiaoping berhasil dan China menjadi negara yang maju.⁷

Sengketa laut China Selatan adalah sebuah konflik yang terjadi dikarenakan klaim tumpang tindih tentang perbatasan teritori darat dan laut diantara enam negara dan juga pelanggaran peraturan *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Enam negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Malaysia, China, Taiwan, Filipina, dan Vietnam. Semua negara di atas beranggapan bahwa laut China Selatan berada dalam perbatasan negara mereka.⁸

China mengklaim seluruh area laut China Selatan dengan “nine-dash line”-nya yang didasarkan oleh sejarah China. Vietnam juga menganggap seluruh area laut China Selatan sebagai area teritori miliknya karena dalam dokumen-dokumen negara Vietnam tertulis bahwa Vietnam sudah menduduki pulau-pulau Paracel dan Spratlys semenjak abad ke-18. Filipina mengklaim sebagian teritori laut China Selatan yaitu dari batas terluar negara Filipina hingga Scarborough Shoal/pulau Huangyan. Malaysia juga mengklaim beberapa pulau di Spratlys dan wilayah yang terdapat dalam area zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia serta Brunei mengklaim teritori laut China Selatan yang jatuh di wilayah ZEE Brunei.⁹

Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam tergabung dalam satu organisasi internasional yang bernama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)

⁷ Andre Lim dan Serene Lim, "China, A Global Economic Powerhouse", Inside.Capitaland.Com, diakses pada Oktober 19, 2016, <http://inside.capitaland.com/investment/255-china-a-global-economic-powerhouse>.

⁸ "Why Is The South China Sea Contentious? - BBC News", *BBC News*, diakses pada 4 September 2016, <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>

⁹ Ibid.

bersama Kamboja, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand, dan Indonesia.¹⁰ ASEAN mempunyai motto “*One Vision, One Identity, One Community*” yang artinya ASEAN mempunyai satu visi, satu identitas, dan merupakan satu komunitas.¹¹ Dengan motto ini semua anggota organisasi regional tersebut dapat membantu satu sama lain dalam menyelesaikan masalah eksternal yang terjadi diluar lingkungan domestik antar anggota maupun diantara anggota ASEAN dengan negara bukan anggota. Indonesia, dalam sengketa laut China Selatan berupaya untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam melawan klaim China yang membahayakan kedaulatan para negara anggota. Hal ini selaras dengan konsep solidaritas yang terdapat di dalam dunia internasional. Konsep solidaritas menjelaskan tentang kekerabatan antar negara yang membuatnya penting bagi para negara untuk menjaga negara lain yang dia anggap sebagai anggotanya. Seperti yang sudah dituliskan diatas, dengan “*One Vision, One Identity, One Community*” sebagai motto ASEAN, Indonesia menganggap Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam sebagai teman seperjuangan dan perlu dilindungi kedaulatannya.¹²

Di sisi lain, hubungan diantara Indonesia dan China dapat dibilang baik. Indonesia dan China memiliki gedung kedutaan yang mewakili negaranya di masing-masing negara. Kedua negara juga melakukan banyak kerjasama bilateral

¹⁰ *ASEAN Member States - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY* (ASEAN, 2016), diakses pada September 5, 2016, <http://asean.org/asean/asean-member-states/>

¹¹ *ASEAN Motto - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY* (ASEAN, 2016), diakses 5 September 2016, <http://asean.org/asean/about-asean/asean-motto/>

¹² "National Interest And International Solidarity: Particular And Universal Ethics In International Life", 2008, *Choice Reviews Online* 46 (04): 46-2340-46-2340. doi:10.5860/choice.46-2340, diakses pada tanggal 4 September 2016, http://archive.unu.edu/unupress/sample-chapters/National_Interest_sample.pdf

dalam berbagai bidang. Beberapa kerjasama bilateral yang terjadi mencakup investasi, perdagangan, pariwisata, dan militer.¹³ China dan Indonesia mempunyai sejarah yang tidak baik diantara keduanya khususnya pada tahun 1998 dikarenakan perlakuan kekerasan dan pemerkosaan masyarakat pribumi Indonesia terhadap warga Tionghoa yang tinggal di Indonesia¹⁴ tetapi sekarang China sudah menjadi salah satu negara dengan kerjasama militer tererat dengan Indonesia. Aktivitas militer yang dilakukan kerjasama tersebut meliputi kunjungan tingkat tinggi, pelatihan personil, *joint exercise*, dan pelatihan koordinasi multilateral dan keamanan maritim.¹⁵

1.2 Identifikasi masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan yang baik dengan ASEAN maupun China. Namun, Indonesia lebih terikat dengan ASEAN karena Indonesia merupakan salah satu pelopor pemrakarsa pendirian ASEAN bersama empat negara lain yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina serta menghasilkan Deklarasi Bangkok.¹⁶ Manapula, ASEAN juga mempunyai motto

¹³ "China And Indonesia", *Ministry Of Foreign Affairs Of The People's Republic Of China*, diakses pada 5 September 2016, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2716_663436/

¹⁴ Abi Sarwato, "Secuil Cerita Kerusuhan Dan Pemerkosaan Di Glodok 1998", *CNN Indonesia*, diakses 5 September 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160522035928-20-132502/secuil-cerita-kerusuhan-dan-pemerkosaan-di-glodok-1998/>.

¹⁵ Zhang Tao, "China, Indonesia Pledge To Enhance Military Cooperation", *Ministry Of National Defense The People's Republic Of China*, diakses pada tanggal 5 September 2016, http://eng.mod.gov.cn/SpecialReports/2015-10/16/content_4624549.htm.

¹⁶ *History - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY* (ASEAN, 2016), diakses pada tanggal 5 September 2016, <http://asean.org/asean/about-asean/history/>

yang menyatakan bahwa ASEAN adalah satu komunitas dengan satu identitas dan satu visi yang membuat anggotanya terikat satu sama lain.¹⁷

Meskipun hubungan antara Indonesia dan ASEAN lebih mengikat, Indonesia tidak bisa meninggalkan ataupun melupakan tentang relasinya dengan China. China adalah salah satu *rising power* di ranah dunia internasional dan mitra strategis Indonesia yang menguntungkan. Selain itu, pergantian presiden antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo membawa perubahan dalam cara pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Dengan perubahan kabinet, rencana kerja, dan visi dan misi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan dapat berubah sesuai dengan kepentingan nasional yang dipegangnya.¹⁸

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penulis merumuskan pertanyaan riset (*research question*) yang menjadi fokus penulisan pada penelitian ini, yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut : **Apa perbedaan usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada masa kepresidenanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam penyelesaian sengketa laut China Selatan?**

¹⁷ *ASEAN Motto - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY* (ASEAN, 2016), diakses September 5, 2016, <http://asean.org/asean/about-asean/asean-motto/>

¹⁸ Natasha Hamilton-Hart dan Dave McRae, *Indonesia: Balancing The United States And China, Aiming For Independence*, (Sydney: The University of Sydney, 2015), diakses pada tanggal September 5, 2016, <http://ussc.edu.au/ussc/assets/media/docs/publications/Emerging-Asia-Reports/MacArthur-Indonesia-ONLINE.pdf>

1.2.2 Pembatasan Masalah

Permasalahan ini akan dibatasi pada usaha-usaha diplomasi Indonesia yang dilakukan dalam sengketa laut China Selatan kepada anggota ASEAN dan China pada tahun 2009-2016. Tahun tersebut diambil karena terjadinya pergantian kepala pemerintahan Republik Indonesia dan terjadinya perubahan terhadap arah politik luar negeri Indonesia termasuk diplomasi Indonesia terhadap laut China Selatan pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Tahun 2009 merupakan awal dari putaran kedua masa kepresidenan SBY¹⁹ dan pada tahun 2016 Jokowi secara resmi diangkat sebagai presiden Indonesia²⁰ dan sengketa laut China Selatan secara resmi dikatakan sebagai sengketa yang selesai berdasarkan putusan PBB²¹. Dalam kurun waktu tersebut akan dilihat peran Indonesia dalam usaha-usaha diplomasinya dalam memenuhi kepentingan nasional dan menyelesaikan sengketa Laut China Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Dengan berfokus pada permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan maksud mengetahui dan memahami bagaimana peran Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan serta mendeskripsikan perbedaan diplomasi Indonesia terhadap konflik laut China Selatan pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhonoyono dan Joko Widodo. Penulis berharap nantinya

¹⁹ "Jokowi Dilantik Hari Ini sebagai Presiden Indonesia", *BBC Indonesia*, diakses pada 1 Juni 2017,

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141016_jokowi_persiapanpelantikan

²⁰ Ihsanuddin, "Pukul 10.00 WIB, Jokowi-JK Dilantik Jadi Presiden-Wakil Presiden", *Kompas.com*, diakses 1 Juni 2017,

<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/20/06541351/Pukul.10.00.WIB.Jokowi-JK.Dilantik.Jadi.Presiden-Wakil.Presiden>

²¹ Katie Hunt, "South China Sea: Philippines Wins Court Ruling Against China". *CNN*. <http://edition.cnn.com/2016/07/12/asia/china-philippines-south-china-sea/>.

penelitian ini dapat berguna untuk bahan referensi terhadap penyelesaian penelitian mengenai diplomasi negara, bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas tentang sengketa laut China Selatan, bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas tentang diplomasi.

1.4 Kajian Literatur

Pada bagian kajian pustaka ini, penulis akan menjelaskan beberapa literatur yang penulis ambil sebagai bantuan untuk menyelesaikan penelitian ini. Literatur-literatur ini memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Namun bukan berarti didalam literatur tersebut terdapat jawaban mutlak akan apa yang penulis teliti.

Indonesia, ASEAN, and The Rise of China : Indonesia in The Midst of East Asia's Dynamics in Post-Global Crisis World

Literatur pertama yang akan dipakai adalah “Indonesia, ASEAN, and The Rise of China : Indonesia in The Midst of East Asia's Dynamics in Post-Global Crisis World” karya Syamsul Hadi. Jurnal ini membahas tentang bagaimana Indonesia dan ASEAN menanggapi pendalaman hubungan ASEAN-China yang semakin dinamis dan bagaimana Indonesai melihat ASEAN sebagai instrumen untuk menjembatani power yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di dalam bacaan ini dipaparkan seberapa besar pengaruh ASEAN dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri Indonesia. Indonesia sudah bergabung di dalam ASEAN semenjak ASEAN dibuat dan bahkan merupakan salah satu bapak pendirinya tetapi ASEAN belum menjadi faktor penting dalam pembuatan keputusan politik luar negeri Indonesia hingga tahun 2007 dikarenakan oleh

pengesahan Piagam ASEAN. Pada tahun 2007, situasi politik Indonesia mengenai pengesahan Piagam ASEAN terbagi menjadi dua yaitu “mendukung” dan “tidak mendukung”. Meskipun ada perdebatan yang kuat diantara kedua belah pihak, pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Piagam ASEAN pada tahun 2008. Semenjak itu keputusan politik luar negeri Indonesia berjalan mengikuti Piagam ASEAN.²²

Anggapan “ASEAN Centrality” menjadi fokus Indonesia dalam menghadapi usaha-usaha China untuk memperluas pengaruhnya ke kawasan Asia Tenggara khususnya pada bidang perekonomian dan dalam sengketa laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga dipilih menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011. Maka dari itu, Indonesia melihat organisasi regional ini sebagai instrumen perpanjangan untuk politik luar negerinya pula. Untuk penyelesaian sengketa laut China Selatan antara beberapa anggota ASEAN dengan China, Indonesia menekankan kepada para negara-negara yang terdapat dalam sengketa tersebut untuk mengimplementasikan Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang damai. Jurnal ini ditutup dengan pernyataan bahwa hubungan antara Indonesia, ASEAN, dan China semakin dinamis dan bagaimana Indonesia telah berusaha untuk mengarahkan ASEAN dan kawasan Asia Tenggara untuk tidak didominasi oleh pengaruh negara besar tertentu.²³

²² Syamsul Hadi, *Indonesia, ASEAN, and the Rise of China: Indonesia in the Midst of East Asia's Dynamics in the Post-Global Crisis World*, International Journal of China Studies 3 (2): 151-166, diakses pada 11 September 2016,
<http://search.proquest.com/docview/1271876168?accountid=31495>

²³ Ibid.

East China Sea Disputes: History, Status, and Ways Forward

Literatur kedua yang akan digunakan oleh penulis adalah “The East China Sea Disputes: History, Status, and Ways Forward” karya Mark J. Valencia. Jurnal ini menerangkan tentang konflik tentang teritori laut antara China dan Jepang di area laut China Timur. Hubungan antara China dan Jepang menghadapi ketegangan dikarenakan klaim yang tumpang tindih diantara kedua belah pihak akan batas teritorial di laut China Timur. Di area laut tersebut terdapat minyak yang berlimpah dan juga sumber daya alam lain yang hidup maupun tidak hidup. Terdapat pula pulau yang dapat menjadi batas terluar baru bagi kedua negara.²⁴ Dari bacaan ini penulis akan memperhatikan bagaimana China menangani dan mengelola masalah tentang teritori lautnya.

Resource Issues and Ocean Governance in Asia Pacific : An Indonesian Perspective

Literatur ketiga yang akan digunakan adalah “Resource Issues and Ocean Governance in Asia Pacific : An Indonesian Perspective” karya Dewi Fortuna Anwar. Isi jurnal ini lebih ditekankan kepada sumber daya alam dan keadaan alam yang ada di area laut China Selatan serta bagaimana para negara melakukan *ocean governance*-nya. Dari bacaan ini, dapat dilihat bahwa wilayah laut China Selatan memiliki hasil alam yang kaya dan juga dikarenakan tumpang tindih klaim negara atas batas wilayah di laut Asia Pasifik, termasuk laut China Selatan, banyak

²⁴ M. J Valencia, *The east china sea disputes: History, status, and ways forward. Asian Perspective*, (38(2), 2015), hal.183-218, diakses pada tanggal Oktober 21, 2016, <http://search.proquest.com/docview/1535072460?accountid=31495>

terjadi kerusakan alam dikarenakan keputusan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara yang bersengketa tersebut.²⁵

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka pemikiran, penulis akan mencoba menjabarkan beberapa konsep dari Hubungan Internasional yang relevan dengan fenomena penelitian yang akan diteliti. Nantinya konsep dan teori ini akan digunakan oleh penulis sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang hadir selama penelitian ini disempurnakan. Kerangka pemikiran ini akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah pada penelitian ini.

Untuk memahami bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi sengketa Laut China Selatan, akan digunakan teori neo-realisme. Menurut Kenneth Waltz, ada tiga poin-poin dasar yang dimiliki oleh neorealisme. Pertama adalah *organizing principle*. Negara-negara berada dalam lingkungan internasional yang anarki. Tidak ada badan supranasional yang dapat mengatur aksi-aksi negara dan hubungan antar negara. Kepentingan nasional yang memotivasi aksi-aksi negara adalah untuk keberlangsungan hidup negara tersebut. Untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, negara akan meningkatkan *power*. Peningkatan *power* dapat dicapai melalui peningkatan kekuatan militer, bergabung dengan suatu organisasi baik regional ataupun global, dan berhubungan dengan negara lain. Kerja sama antar negara dilakukan untuk meningkatkan *power* dan juga menghindari pecahnya perang. Poin kedua adalah *functional differentiation*. Dalam poin ini ditekankan

²⁵ Dewi Fortuna Anwar, *Resource Issues and Ocean Governance in Asia Pacific: An Indonesian Perspective*, Contemporary Southeast Asia, (28 (3), 2006), hal. 466-489 diakses 12 September 2016, <http://search.proquest.com/docview/205221218?accountid=31495>

bahwa adanya pembagian kerja dalam dunia internasional. Poin terakhir adalah *distribution of capability* yang memiliki arti bahwa kedudukan semua negara sama dan yang membedakannya hanyalah kapabilitas negara tersebut. Dalam neorealisme Kenneth Waltz ditekankan pula negara akan bergerak mengikuti situasi lingkungan internasional dilandaskan oleh kepentingan nasional negara masing-masing.²⁶

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang dijunjung tinggi dan dipertahankan. Kepentingan nasional adalah motivasi dari aksi-aksi yang dilakukan oleh semua negara. Menurut Charles A. Beard, kepentingan nasional adalah pembentuk keputusan politik suatu negara yang dipengaruhi oleh keadaan internal dan keadaan eksternal dari dunia internasional. Keadaan internal yang dimaksud adalah situasi domestik negara seperti hukum, situasi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dll. Sedangkan keadaan eksternal berputar pada dinamika dan keadaan dunia internasional.²⁷ Anggapan lain juga mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan sebuah negara dan bagaimana sebuah negara membayangkan cara pertahanan mereka dan proyeksi *power* mereka di luar perbatasan negara.²⁸

Menurut Thomas W. Robinson, ada enam tipe kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara. Enam tipe tersebut adalah kepentingan nasional

²⁶ Cynthia Weber, *International Relation Theory : A Critical Introduction*, (London: Routledge, 2010,) hal. 15-16

²⁷ Scott Burchill, *The National Interest In International Relations Theory*, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005), hal. 1

²⁸ Jean-Marc Coicaud, Nicholas J. Wheeler, ed., *National Interest And International Solidarity: Particular And Universal Ethics In International Life*, 2008, Choice Reviews Online 46 (04): 46-2340-46-2340, doi:10.5860/choice, 46-2340, diakses pada tanggal September 4, 2016, http://archive.unu.edu/unupress/sample-chapters/National_Interest_sample.pdf

primer, kepentingan nasional sekunder, kepentingan nasional permanen, kepentingan nasional variabel, kepentingan nasional spesifik, dan kepentingan nasional umum. Pertama, kepentingan nasional primer/vital. Kepentingan nasional ini adalah jenis kepentingan nasional yang negara tidak bisa diganggu gugat karena dapat mengganggu kestabilan negara. Beberapa contoh dari kepentingan nasional primer adalah pertahanan negara, urusan militer. Kedua, kepentingan nasional sekunder. Kepentingan nasional sekunder memiliki tingkat kepentingan yang berada di bawah kepentingan nasional primer tetapi tetap saja harus dipenuhi. Melindungi warga negara di luar negeri merupakan salah satu contoh kepentingan nasional sekunder. Ketiga, kepentingan nasional permanen. Kepentingan nasional permanen merupakan jenis kepentingan nasional yang berjangka panjang dan lama untuk berubah. Salah satu contoh dari kepentingan nasional ini adalah memastikan stabilnya pengaruh Amerika Serikat di dunia internasional. Keempat, kepentingan nasional variabel. Jenis kepentingan nasional ini adalah jenis kepentingan yang paling mudah untuk berubah karena kepentingan nasional variabel ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar serta dalam negara saat suatu keputusan dibuat. Kelima, kepentingan nasional general. Keenam, kepentingan nasional spesifik.²⁹

Untuk memenuhi kepentingan nasional negara akan membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah instrumen yang digunakan oleh negara dalam

²⁹ "National Interest: Meaning, Components And Methods", *Yourarticlelibrary.Com: The Next Generation Library*, diakses pada tanggal 4 September 2016, <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487/>

arena politik internasional. Menurut Mark R. Amstutz, kebijakan luar negeri adalah eksplisit berdasarkan pemerintah dan dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional di luar batas-batas teritori negara. Nuansa dari kebijakan luar negeri yang diaplikasikan atau dibuat oleh suatu negara sangat bergantung dengan presiden dan orang-orang di pemerintahan yang berkuasa pada saat itu.³⁰

Untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi terhadap politik Indonesia kepada sengketa laut China Selatan ketika presiden Indonesia berganti dari Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Joko Widodo, penulis akan menggunakan teori politik luar negeri oleh James Rosenau dengan fokus idiosinkrasi. James N. Rosenau adalah salah satu teoritis generasi pertama politik luar negeri. Ia berpendapat bahwa proses pembuatan keputusan politik luar negeri dalam tingkat analisis. Pihak yang menganalisis sebaiknya memfokuskan saja pada salah satu tingkat analisis yang dianggap paling dominan dalam pembuatan politik luar negeri tersebut. Rosenau menentukan bahwa dalam kajian politik luar negeri ada lima variabel utama yang harus diperhatikan yaitu idiosinkrasi, peranan, pemerintahan, masyarakat, dan sistemik. Pada kesempatan ini penulis akan memfokuskan penulisan kepada variabel idiosinkrasi. Di variabel ini faktor individual lah yang mempengaruhi keputusan politik luar negeri suatu negara. Sifat kepala negara atau pembuat keputusan menjadi dasar sikap pembuatan politik luar negeri negara dan menjadikannya berbeda satu dengan yang lainnya. Idiosinkrasi meliputi semua aspek yang ada pada para pembuat keputusan seperti

³⁰ TA Sipatuhar, *BAB II Kebijakan Luar Negeri*, (1985) diakses pada tanggal 20 Oktober 2016. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49201/3/Chapter%20II.pdf>

keahlian, nilai-nilai yang dipegangnya, dan pengalamannya yang membedakannya dengan para pembuat keputusan lainnya.³¹

Setiap kepala negara memiliki gaya kepemimpinannya sendiri. Margaret Hermann mengemukakan bahwa ada delapan tipe kepemimpinan yaitu *ekspansionistic*, *evangelistic*, *incremental*, *charismatic*, *directive*, *consultative*, *reactive*, dan *accomodative*. Tipe *ekspansionistic* akan memfokuskan kepada cara untuk meningkatkan *power*. Tipe *evangelistic* akan mengajak pihak-pihak disekitarnya untuk bergabung memperjuangkan tujuannya. Tipe *incremental* berfokus kepada menghindari segala halangan sambil mempertahankan fleksibilitas dalam pergerakannya. Tipe *charismatic* fokus mencapai targetnya dan meyakinkan pihak lain untuk bergerak. Tipe *directive* akan melakukan aksi yang sesuai dengan kepribadiannya sementara masih mengikuti peraturan. Tipe *consultative* akan mengontrol hal yang dianggap penting oleh pihak lain. Tipe *reactive* fokus kepada menilai bagaimana cara menindaklanjuti dan mengurutkannya berdasarkan seberapa pentingnya. Tipe *accomodative* menaruh fokus dalam menyelaraskan perbedaan dan membentuk kesepahaman bersama, memberdayaan pihak lain dan berbagi pertanggungjawaban dalam prosesnya.³²

Negara memiliki banyak cara untuk memastikan terpenuhinya kepentingan nasionalnya. Beberapa cara yang paling sering digunakan oleh para negara adalah diplomasi, pembuatan aliansi, perjanjian, pembuatan relasi ekonomi, aksi koersif,

³¹ James N. Rosenau, *Pre-Theories and Theories of Foreign Policy*, (Evanston : Northwestern University Press, 1966)

³² Margaret G. Hermann, *Assessing Leadership Style : A Trait Analysis*, (2002)

dan juga propaganda.³³ Dalam kamus Oxford, diplomasi dapat diartikan sebagai sebuah profesi, aktivitas, atau keterampilan mengelola hubungan internasional, biasanya dengan perwakilan negara A di negara B.³⁴ Definisi lain dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Menurutnya, diplomasi adalah promosi kepentingan nasional dengan cara yang damai. Adam Watson mendefinisikan diplomasi sebagai dialog antar negara.³⁵ Diplomasi memiliki banyak bentuk yaitu diplomasi publik, diplomasi budaya, diplomasi jalur satu, diplomasi jalur dua, diplomasi multijalur. Tujuan negara melakukan diplomasi adalah untuk mempengaruhi kebijakan, sikap, dan tindakan negara lain terhadapnya melalui diplomat. Aktor diplomatik utama dalam kegiatan diplomasi adalah diplomat. Diplomat suatu negara dapat mempengaruhi diplomat dari negara lain ataupun pemerintahan negara luar dengan cara persuasi, tukar-menukar konsensi, penawaran penghargaan, dan/atau mengirmkan ancaman.³⁶ Diplomasi merupakan salah satu cara yang paling populer, pada masa sekarang, untuk mempererat hubungan, memulai hubungan, dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi antar negara.³⁷

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian tentang usaha-usaha diplomasi Indonesia dalam sengketa laut China

³³ *ibid.*

³⁴ Oxford Dictionary, "Diplomacy", diakses pada 4 September 2016, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/diplomacy>

³⁵ Adam Watson, *Diplomacy : The Dialogue Between States* (London: Routledge, 1985)

³⁶ Eric Clark, *The World of International Diplomacy* (New York: Taplinger Pub.Co.NY, 1973), hal. 83

³⁷ "Diplomacy: Meaning, Nature, Functions And Role In Crisis Management", Yourarticlelibrary.Com: The Next Generation Library, diakses pada tanggal 19 September 2016, <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/diplomacy-meaning-nature-functions-and-role-in-crisis-management/48491/>

Selatan akan dilakukan secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara pendekatan penelitian melalui berbagai jenis data dalam bentuk tulisan. Contohnya dari data kajian literatur seperti jurnal, artikel, dll. Pendekatan ini umumnya menggunakan studi kasus untuk mengolah data-data yang ada dan kemudian dilakukannya pengujian teori.³⁸

Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang deskriptif dan lebih mengandalkan analisis karena data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis harus dianalisa dan dibandingkan dengan teori yang sudah dipilih oleh penulis. Pendekatan jenis kualitatif merupakan pendekatan teoritis yang menggabungkan kajian-kajian literatur yang ditentukan oleh penulis dengan teori yang sudah dipilih oleh penulis.³⁹ Cara ini dianggap oleh penulis sebagai metode yang paling sesuai untuk agar analisa yang dibuat dapat dikerjakan dengan efektif dan tepat sasaran serta agar pengembangan konsep dan penghimpunan fakta tidak dengan melakukan pengujian hipotesis semata.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Data ini didapatkan melalui teknik studi literatur, studi kepustakaan dan studi dokumen dengan membaca buku, jurnal, surat kabar dan media lain seperti internet dan website resmi yang terpercaya. Literatur yang akan digunakan berasal, tetapi tidak dibataskan, dari jurnal yang berjudul “The Water Territory - Component of The State Territory” karya Lames Daniela, “Indonesia, ASEAN,

³⁸ Mohamad Rosyidin, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hal. 42

³⁹ *ibid.*

and The Rise of China : Indonesia in The Midst of East Asia's Dynamic in Post-Global Crisis World” karya Syamsul Hadi, “The UN Convention on The Law of The Sea and The Maritime Disputes in The South China Sea” karya Robert Beckman, dan “An Indonesian Perspective Toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest While Maintaining Neutrality In The South China Sea Possible?” karya Masyithoh-Annisa Ramadhani.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penulis akan membagi skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, yang akan digambarkan secara garis besar melalui sistematika pembahasan:

Pada bab pertama akan dibahas latar belakang masalah, identifikasi masalah yang didalamnya terdiri dari pembahasan dan perumusan masalah. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya membahas kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian, terdiri dari survey literatur dan kerangka teoritis. Kemudian membahas metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

Pada bab kedua dalam penelitian ini akan memaparkan sejarah dari konflik laut China Selatan dan klaim-klaim negara yang terlibat secara langsung

Pada bab ketiga, pembahasan akan dilanjutkan oleh sejarah dari konflik Laut China Selatan serta analisis kegiatan diplomasi Indonesia terhadap laut China Selatan. Di bab ini data-data tentang diplomasi Indonesia terkait dengan sengketa laut China Selatan pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi Widodo yang sudah dikumpulkan oleh penulisan akan dibandingkan dan

dianalisis menggunakan teori-teori dan pandangan yang sudah dipilih oleh penulis.

Pada bab keempat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang akan berisi tentang kesimpulan. Disini akan diketahui apakah ada perbedaan dari aksi diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap sengketa laut China Selatan pada masa SBY dan Jokowi.